

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Langkah-Langkah Penelitian	19
BAB II TEORI KEWENANGAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	
.....	23
A. Pengertian Kewenangan dan Pembatalan Peraturan Daerah	23
1. Pengertian Kewenangan.....	23
2. Pembatalan Peraturan Daerah	28
B. Kedudukan dan Tugas Menteri DalamNegeri.....	35

C. Landasan Yuridis Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah	40
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	40
2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017	43
D. Presfektif Siyasah Dusturiyah Tentang Pemerintah.....	46
1. Pemerintahan.....	46
2. Presfektif Siyasah Dusturiyah tentang Pemerintah.....	50
BAB III PEMBAHASAN.	59
A. Pelaksanaan Kewenangan Menteri Dalam Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU/XIII-2015.....	59
B. Apa Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembatalan Kewenangan Menteri Dalam Negeri.....	74
C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Menteri Dalam Negeri Berdasarkan Pasaca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	83
BAB IV PENUTUP.	102
A. Simpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN